

Transformasi Norma Gender dan Pembangunan Ekonomi: Studi Gerakan 4B di Korea Selatan

Firda Aina Mardliyah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Diterima: 10 Juli, 2025 | Revisi: 26 September, 2025 | Disetujui: 14 Oktober, 2025 | Diterbitkan: 15 Oktober, 2025

ABTSRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial dan ekonomi Gerakan 4B di Korea Selatan sebagai respons terhadap norma gender tradisional dalam masyarakat patriarkal yang masih dipengaruhi nilai Konfusianisme. Gerakan 4B yang menolak pernikahan, melahirkan anak, pacaran, dan hubungan seksual muncul sebagai bentuk perlawanan perempuan muda terhadap diskriminasi gender, kesenjangan upah dan keterbatasan ekonomi. Studi ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan landasan teori Gender and Development (GAD) dan Ekonomi Feminisme, untuk mengeksplorasi bagaimana redefinisi peran perempuan melalui Gerakan 4B berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDG-5 (kesetaraan gender). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan 4B mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi, preferensi hidup mandiri, dan partisipasi perempuan di sektor ekonomi non-tradisional. Transformasi ini memicu pertumbuhan sektor jasa berbasis individualisme, sekaligus menurunkan permintaan pada industri tradisional seperti pernikahan dan properti keluarga. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko penurunan angka kelahiran yang berimplikasi pada struktur demografi dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Gerakan 4B, Kesetaraan Gender, Pembangunan Ekonomi, SDGs, Transformasi Sosial

Gender Norm Transformation and Economic Development: A Study of South Korea's 4B Action.

ABSTRACT

This study aims to analyze the social and economic impacts of the 4B Movement in South Korea as a response to traditional gender norms in a patriarchal society that is still influenced by Confucian values. The 4B Movement, which rejects marriage, childbearing, dating, and sexual relations, emerged as a form of resistance by young women against gender discrimination, wage disparities, and economic limitations. This study uses a qualitative method based on literature studies, with a foundation in Gender and Development (GAD) theory and Feminist Economics, to explore how the redefinition of women's roles through the 4B Movement contributes to sustainable development and the achievement of SDG-5 (gender equality). The results show that the 4B Movement has driven significant changes in consumption patterns, preferences for independent living, and women's participation in non-traditional economic sectors. This transition has resulted in the expansion of the individualism-based service industry while decreasing demand for traditional businesses like weddings and family property. However, this phenomena introduces new concerns, such as the risk of diminishing birth rates, which have repercussions for the demographic structure and sustainability of the national economy.

Keywords: 4B Action, Gender Equality, Economic Development, SDGs, Social Transformation

How to Cite:

Mardliyah, F.A. (2025). Transformasi Norma Gender dan Pembangunan Ekonomi: Studi Gerakan 4B di Korea Selatan. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 9(1), 34-53. <https://doi.org/10.33005/jdep.v9i1.859>

***Corresponding Author:**

Email : b300210020@student.ums.ac.id

Alamat : Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo



This article is published under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan akses partisipasi yang setara antara pria dan wanita dalam sistem sosial. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) ke-5, dan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Indeks* (Faridatussalam, Wahyuningrum, & Anggraini, 2023). Meskipun berbagai kebijakan dan inisiatif telah dirancang untuk mencapai tujuan ini, banyak masyarakat, terutama di negara-negara dengan budaya patriarki yang kuat, masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi norma-norma gender tradisional yang membatasi peran perempuan dalam ekonomi dan sosial. Korea Selatan, sebagai salah satu negara maju di Asia Timur, memiliki dinamika yang menarik dalam hal ini. Di tengah modernisasi yang pesat, nilai-nilai Konfusianisme yang telah mengakar kuat terus membentuk norma gender, memperkuat ekspektasi sosial bahwa perempuan harus mengutamakan peran domestik sebagai istri dan ibu (Mun-Hee, 2025). Pandangan tersebut kurang selaras dengan teori pembangunan ekonomi modern.

Pembangunan Ekonomi modern melihat modal pembangunan tidak hanya sebatas pada modal fisik (*physical capital*), namun juga modal manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*). Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan sebuah negara untuk meningkatkan mutu pembangunan tidak hanya pada bangunan fisik namun juga pada sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Hal ini juga mendorong adanya akselerasi pembangunan berbasis *human development*. *United Nation Development Programme* (UNDP) menyebutkan bahwa salah satu premis dasar dalam pembangunan manusia adalah mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Gagasan tersebut selanjutnya melahirkan teori yang dicetuskan oleh *United Nations Population Fund* (UNPF) pada Konferensi Internasional tentang Populasi dan Pembangunan yang dilaksanakan di Mesir pada 5-13 September 1994, yakni tentang *People Centered Development Theory* dimana segala pembangunan ekonomi harus memiliki prinsip berwawasan kependudukan. Konferensi ini memiliki berbagai tujuan dimana salah satunya adalah menciptakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan dukungan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Tujuan tersebut lantas direpresentasikan dalam berbagai bentuk kebijakan di setiap negara dunia.

Beberapa waktu terakhir, di Korea Selatan muncul gerakan 4B (*Bi-hon, Bi-chulsan, Bi-yunae, Bi-sekseu*). (Munculnya Gerakan 4B, yang menolak pernikahan, melahirkan anak, berkecanduan, dan hubungan seksual, telah menjadi katalis perubahan sosial yang signifikan. Fenomena ini lahir dari sebuah utas yang digagas oleh seorang pengguna Twitter (sekarang X) pada Maret 2018, yang mengisyaratkan perempuan lain untuk mulai belajar ekonomi, dan cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri sebagai wanita yang lebih independent (Lee & Jeong, 2021). Gerakan ini tidak hanya mempersoalkan peran tradisional perempuan, tetapi juga menantang struktur ekonomi yang didasarkan pada norma-norma tersebut. Dengan menolak keterlibatan

dalam institusi tradisional, Gerakan 4B mendorong redefinisi peran perempuan dalam masyarakat dan ekonomi (Masood & Erdogdu, 2024).

Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan, seperti yang terlihat di Kalimantan Timur, Indonesia. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index/GEI*) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan politik mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender (Purba, 2024). Meskipun indikator lain seperti rata-rata lama sekolah dan harapan hidup perempuan belum menunjukkan pengaruh besar, peningkatan representasi perempuan di sektor formal dan pengambilan keputusan terbukti meningkatkan produktivitas ekonomi regional. Fenomena tersebut tentu saja mengundang diskursus lebih dalam tentang disparitas gender, mengingat Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*) di negara-negara berkembang masih relatif tinggi (Al Faizah, Perwithosuci, & Hidayah, 2022). Upaya mengurangi kesenjangan gender menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kaum feminis Korea yang tergabung dalam gerakan tersebut secara aktif menentang berbagai tekanan berbasis gender yang dikonstruksi dalam masyarakat konservatif. Mereka melakukan ini bukan hanya dengan menarik diri dari dunia kewanitaan, tetapi juga dengan menolak standar kecantikan yang dominan di negara tersebut, serta praktik konsumtif yang sering kali terkait dengan standar tersebut. Gerakan ini menantang jalur kehidupan tradisional yang mengharuskan perempuan untuk menikah dan membangun keluarga, sambil mengecam diskriminasi yang dialami perempuan di pasar kerja Korea (*Organisation for Economics Co-operation and Development*). Tidak hanya itu, perempuan juga mendapatkan ketidakadilan pada distribusi upah di dunia kerja. Di sana, perempuan menerima upah 31% lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki mereka, baik saat mereka masih lajang maupun setelah mereka menjadi ibu (Puspitasari & Sundari, 2025). Hal ini tentu saja menimbulkan pertentangan besar dari kalangan perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama ketika kontribusi dari setiap kelompok sangat dibutuhkan.

Gerakan ini menjadi masif dalam waktu yang cukup singkat. Masifnya gerakan 4B tentu memiliki dampak lebih lanjut pada struktur ekonomi dan sosial masyarakat Korea Selatan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara mikro namun juga makro. Keberlangsungan gerakan ini tentu berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Korea Selatan. Ketidaksediaan perempuan untuk menjalin relasi dengan pria akan mendorong perempuan untuk memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, menaikkan nilai diri, dan juga menjadi berdaya dengan dirinya. Kondisi tersebut akan mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga meningkat dan berpengaruh terhadap berbagai keputusan ekonomi lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan 4B berdampak pada pembangunan manusia khususnya dampak terhadap norma gender dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bagaimana gerakan 4B

juga memiliki pengaruh terhadap kondisi makro dan mikro di Korea Selatan. Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara norma sosial dan ekonomi, perubahan disparitas gender, dan pembangunan manusia yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini akan menghubungkan relevansi gerakan ini dengan SDG-5, yang menempatkan kesetaraan gender sebagai pilar utama pembangunan global.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berbicara tentang dampak Gerakan 4B di Korea Selatan, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang bagaimana perubahan sosial dapat menjadi katalis bagi pembangunan manusia yang merupakan salah satu pilar pokok dalam transformasi pembangunan ekonomi yang lebih luas. Maka, penelitian ini akan membahas pembangunan ekonomi dalam perspektif pembangunan modal manusia dan analisis transformasi gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum tentang potensi dan tantangan dalam menciptakan model pembangunan yang lebih progresif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari Gerakan 4B di Korea Selatan. Pendekatan kualitatif adalah metode yang dirancang untuk digunakan pada penelitian yang bersifat kajian mendalam pada suatu fenomena kontemporer (Moleong, 2021). Metode ini pada umumnya dapat memberikan jawaban yang lugas mengenai bagaimana ataupun mengapa suatu hal dapat terjadi. Oleh karena itu, metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kompleks melalui eksplorasi literatur yang relevan dan dapat memperoleh jawaban atas alasan mengapa suatu hal terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta analisis media (Sugiyono, 2021). Selain itu, data sekunder dari lembaga internasional seperti OECD, Bank Dunia, dan *UN Women* turut digunakan untuk memberikan landasan empiris dalam penelitian ini.

Prosedur penelitian akan dilakukan dalam tiga tahapan utama. Pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk literatur akademik, laporan resmi, dan media. Fokus utama dalam pengumpulan data adalah pada penelitian yang membahas norma gender, ekonomi feminisme, dan perubahan sosial di Korea Selatan. Kedua, analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif kualitatif untuk memahami hubungan antara perubahan norma gender yang diinisiasi oleh Gerakan 4B dan dampaknya terhadap struktur sosial serta ekonomi. Ketiga, validasi data dilakukan dengan cara mengevaluasi konsistensi dan relevansi berbagai temuan dari sumber yang digunakan, memastikan bahwa informasi yang diolah memiliki kredibilitas dan mendukung analisis yang dilakukan (Dull & Reinhardt, 2014).

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori. Teori pertama yang juga merupakan *grand theory* pada penelitian ini adalah Teori Pembangunan Manusia

(*Human Development Theory*). Teori ini pertama kali dicetuskan oleh UNDP. Pada teori ini disebutkan bahwa dalam pembangunan manusia tidak boleh hanya memperhatikan nilai ekonomis saja namun juga harus memperhatikan beberapa hal lain seperti produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Berkaitan dengan pemberdayaan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai pemberdayaan manusia dalam konteks pemberdayaan perempuan melalui pembangunan gender. Oleh karena itu, digunakan pula beberapa teori yang berkaitan dengan pembangunan gender.

Teori pembangunan gender yang pertama yaitu *Gender and Development* (GAD). Teori *Gender and Development* (GAD) menyoroti pentingnya memahami hubungan antara ketidaksetaraan gender dan pembangunan ekonomi (Kabeer, 1999). GAD menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana norma gender yang membatasi peran perempuan dapat memengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi, peluang kerja, dan pembangunan sosial. Dalam konteks penelitian ini, GAD relevan untuk mengevaluasi bagaimana Gerakan 4B menantang norma gender tradisional di Korea Selatan, serta bagaimana perubahan tersebut berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG-5), terutama dalam kesetaraan gender.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Ekonomi Feminisme, sebuah pendekatan yang berfokus pada bagaimana peran gender memengaruhi struktur dan dinamika ekonomi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh (Waring, 1988) dalam bukunya *If Women Counted* (1988), yang mengkritisi cara ekonomi tradisional mengabaikan kontribusi perempuan, terutama dalam pekerjaan tidak berbayar seperti pekerjaan domestik dan pengasuhan anak (D'Ambrosio & Rao, 2015). Dalam konteks Gerakan 4B, teori ini membantu menjelaskan bagaimana penolakan terhadap institusi tradisional, seperti pernikahan dan keluarga, mengubah pola konsumsi dan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Teori ini juga menggarisbawahi bagaimana perempuan dapat menjadi agen perubahan ekonomi yang signifikan ketika mereka bebas dari norma-norma yang membatasi.

Dalam upaya memahami keterkaitan antara gerakan sosial dan perubahan struktur ekonomi, penelitian ini mengadopsi pendekatan teoritis yang relevan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dengan menggunakan pendekatan *Human Development, Gender and Development* (GAD) dan Ekonomi Feminisme sebagai kerangka analisis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Gerakan 4B tidak hanya menjadi respons terhadap norma patriarkal, tetapi juga menjadi katalis untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Manusia dan Reformasi Disparitas Gender

Gerakan 4B mulai muncul pada tahun 2017 dan terus merebak hingga sekitar tahun 2019. Pada mulanya gerakan ini merupakan refleksi dari rasa kecewa para

perempuan di Korea Selatan atas berbagai perlakuan tidak adil dan ketidaksetaraan gender. Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan bahwa para perempuan di Korea Selatan banyak menghadapi ketidaksetaraan seperti beban pengasuhan yang lebih berat, tingkat upah yang lebih rendah, dan keterbatasan aksesibilitas di berbagai kesempatan (Shakina, 2022). Pemicu utama gerakan ini adalah adanya seorang perempuan yang dibunuh secara brutal di sebuah stasiun di wilayah Gangnam dimana pelaku mengaku bahwa pembunuhan tersebut dilatarbelakangi adanya kebencian terhadap kaum perempuan karena dirinya telah berulang kali ditolak oleh perempuan (Humairah & Dewi, 2025). Gerakan 4B terdiri dari :

1. *Bi-hon* (Tidak Menikah)

Poin ini menunjukkan bahwa para perempuan menolak adanya pernikahan. Hal ini diusung karena para perempuan menilai bahwa tingkat patriarki di Korea Selatan sangat tinggi. Beban pengasuhan dan pekerjaan domestik hampir seluruhnya tertumpu pada perempuan. Budaya patriarki telah mengakar di Korea Selatan karena berasal dari budaya kerajaan yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun.

2. *Bi-chulsan* (Tidak Melahirkan Anak)

Poin ini sebenarnya tidak membatasi pada perempuan dan melahirkan namun secara lebih luas, poin ini juga menunjukkan ketidaksediaan perempuan untuk memiliki anak. Dimana secara umum, memiliki anak memiliki korelasi yang kuat dengan kelahiran. Perempuan memiliki beban pengasuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Beban ini terasa lebih berat dengan adanya tuntutan di berbagai sektor formal bagi seorang perempuan bekerja. Beban menyusui dan membesarkan anak tanpa adanya dukungan fasilitas publik yang memadai menjadikan beban pengasuhan tersebut menjadi semakin berat. Tidak sedikit para perempuan bekerja yang kemudian harus meninggalkan karir karena harus melakukan tugas pengasuhan (*caregiver*)

3. *Bi-yunae* (Tidak Berkencan dengan Pria)

Poin ini muncul karena adanya anggapan bahwa berkencan merupakan jalan pertama menuju pernikahan. Oleh karena itu, penolakan terhadap pernikahan harus disertai dengan penolakan terhadap ajakan berkencan. Selain itu, poin ini muncul karena banyak ditemui adanya kekerasan berbasis gender. Dimana banyak perempuan di Korea Selatan yang mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk ketika ingin mengakhiri hubungan asmara (Zimmermann, 2023). Oleh karena itu, poin ini dianggap sebagai salah satu bentuk penolakan kekerasan berbasis gender.

4. *Bi-sekseu* (Tidak Melakukan Hubungan Seksual dengan Pria)

Hal ini merupakan representatif dari pernyataan poin kedua untuk tidak memiliki anak. Berhubungan seksual meningkatkan probabilitas seorang perempuan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap penolakan untuk memiliki anak tentunya adalah dengan menolak

melakukan hubungan seksual. Alasan lain adalah karena banyak kekerasan terhadap perempuan yang bermula dari aktivitas hubungan seksual dengan pria baik karena adanya jalinan asmara ataupun karena adanya pelecehan seksual.

Gerakan 4B tidak hanya merepresentasikan penolakan terhadap norma tradisional, tetapi juga memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara perubahan sosial dan struktur ekonomi. Dalam masyarakat dengan sistem patriarkal yang mengakar, seperti Korea Selatan, institusi-institusi seperti pernikahan dan keluarga sering kali berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat ketimpangan gender, sebagaimana yang disuarakan oleh kelompok radikal kultural. Dengan menolak institusi-institusi ini, perempuan yang berpartisipasi dalam Gerakan 4B mengubah cara pandang terhadap otonomi pribadi, hubungan antargender, dan distribusi peran domestik (Lee & Jeong, 2021). Perubahan ini berdampak langsung pada dinamika sosial, termasuk bagaimana masyarakat mengelola kebutuhan ekonomi yang bergeser akibat pola hidup individu yang lebih mandiri.

Lebih jauh lagi, Gerakan 4B berfungsi sebagai cermin atas proses modernisasi sosial yang sedang berlangsung di Korea Selatan. Gerakan ini mencerminkan bagaimana pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Korea Selatan masih dinilai gagal dalam menghadirkan pembangunan yang responsif perempuan. Pembangunan Modal Manusia (*Human Capital*) pada negara berkembang umumnya menghadapi beberapa tantangan diantaranya adalah rendahnya tingkat literasi dan pendidikan, akses fasilitas kesehatan yang tidak memadai, tingginya angka pengangguran dan pekerjaan dengan upah tidak layak, *brain drain*, dan disparitas gender (Entekhabi, 2023). Munculnya gerakan 4B merupakan gambaran bagaimana disparitas gender merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan sebuah negara. Kegagalan peran pemerintah, yang dalam hal ini adalah kegagalan pemerintah dalam menghadirkan ruang aman dan setara bagi para perempuan memicu adanya gerakan masif yang berujung pada revolusi peran perempuan.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan resistensi terhadap nilai-nilai tradisional, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam memasuki ruang publik, baik dalam konteks pekerjaan maupun representasi sosial (Karim, Pattiruhu, & Chin, 2022). Dalam konteks ini, gerakan tersebut memberikan peluang untuk menganalisis bagaimana struktur sosial yang berubah dapat menjadi pemicu bagi reformasi kebijakan, terutama dalam mendukung perempuan yang memilih untuk hidup di luar jalur tradisional. Oleh karena itu, Gerakan 4B tidak hanya menjadi respons lokal terhadap ketimpangan gender, tetapi juga berpotensi menjadi model global dalam menciptakan struktur sosial yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Pada akhirnya, revolusi tersebut berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi baik secara mikro maupun makro. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang terdampak dari adanya gerakan tersebut:

1. Struktur Sosial dan Pola Konsumsi

Generasi muda di Korea Selatan, terutama perempuan, merespons Gerakan 4B dengan antusias. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perempuan muda yang memutuskan untuk mengesampingkan pernikahan dan memilih hidup mandiri (Kim, 2023). Mereka melihat gerakan ini sebagai bentuk pembebasan dari tekanan sosial yang berlebihan. Generasi ini, yang sering disebut sebagai *YOLO generation* (*You Only Live Once*), menunjukkan pergeseran nilai terhadap individualisme dan kebebasan pribadi (Zenebe, Han, & Hong, 2025). Mereka menolak institusi pernikahan sebagai sumber kebahagiaan yang dipaksakan oleh norma tradisional.

Perubahan norma gender yang diinisiasi oleh Gerakan 4B tidak hanya memengaruhi struktur sosial tetapi juga membawa dampak signifikan pada pola konsumsi masyarakat Korea Selatan (Kim, et al, 2002). Sektor industri tradisional yang bergantung pada resepsi pernikahan, kebutuhan parenting, dan properti keluarga mulai mengalami penurunan permintaan. Pada tahun 2022, sektor ini menyumbang sekitar 58% dari PDB Korea Selatan, mencerminkan kontribusi ekonomi yang substansial melalui berbagai produk dan layanan yang terkait dengan keluarga. Namun, perubahan preferensi konsumen, khususnya perempuan muda, menunjukkan bahwa pola pengeluaran masyarakat telah bergeser, sebagaimana terlihat dari penurunan pengeluaran selama Bulan Keluarga (Mei 2019–2020) (Yoon, 2018). Penurunan ini mengindikasikan pergeseran prioritas dari pengeluaran berbasis keluarga ke konsumsi yang lebih individualistik.

Sebagai respons terhadap perubahan ini, sektor layanan yang berfokus pada kegiatan soliter mengalami pertumbuhan signifikan. Misalnya, layanan Beam Solo dari Beam Mobility mencatat lonjakan pelanggan hingga 10 kali lipat dalam enam bulan terakhir, mencerminkan tingginya minat terhadap mobilitas yang fleksibel dan ramah lingkungan. Di sektor pariwisata, perempuan kini lebih memilih pengalaman perjalanan yang personal dan sesuai dengan preferensi mereka, dengan industri pariwisata menghasilkan sekitar 84,7 triliun won (\$59,1 miliar) pada tahun 2023 (Bahari, 2023). Tren ini menggarisbawahi peningkatan kesadaran perempuan muda akan pentingnya gaya hidup mandiri dan pengalaman individu, sekaligus mencerminkan pergeseran konsumsi dari kebutuhan kolektif ke aktivitas yang mendukung kebebasan, otonomi, dan keberlanjutan.

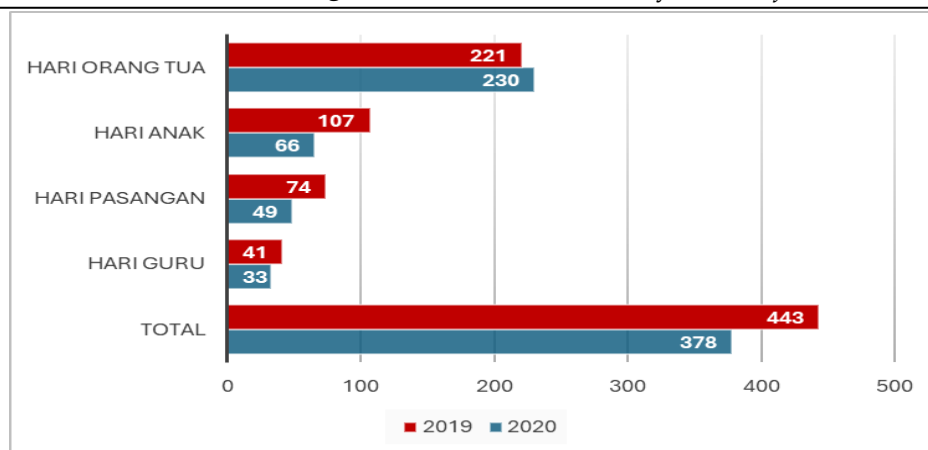
Perubahan pola konsumsi di Korea Selatan, yang beralih dari kebutuhan kolektif ke preferensi individu, telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru yang lebih fleksibel dan berorientasi pada gaya hidup mandiri (Lee, Lim, & Song, 2005). Tren ini memunculkan peluang ekonomi di sektor jasa dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan personal. Namun, di sisi lain, sektor tradisional seperti properti keluarga besar dan industri pernikahan mengalami penurunan tajam, mencerminkan pergeseran nilai dan prioritas generasi muda. Penurunan angka pernikahan, misalnya, mengurangi permintaan terhadap layanan-layanan yang sebelumnya menjadi pilar dalam industri tradisional (Kim, et al, 2021). Pergeseran ini menunjukkan dinamika

ekonomi baru, di mana preferensi individu mendorong inovasi di sektor-sektor modern yang lebih responsif terhadap gaya hidup mandiri.

Transformasi konsumsi ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan, khususnya dalam membentuk kembali struktur masyarakat. Semakin banyak perempuan muda yang memilih untuk hidup sendiri dan mengejar aspirasi pribadi dibandingkan mengikuti norma tradisional (Manek, 2023). Hal ini menciptakan perubahan dalam struktur keluarga dan cara perempuan memandang peran mereka dalam masyarakat. Meskipun perubahan ini memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan ulang kebebasan pribadi, tantangan baru juga muncul, seperti meningkatnya risiko isolasi sosial dan kesepian (Kim, 2021). Oleh karena itu, meskipun transformasi ini mengarah pada kemajuan sosial, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa aspek kesejahteraan sosial tidak diabaikan.

Selain dampak sosial, perubahan ini juga membawa kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Pergeseran pola konsumsi menuju preferensi individu mendorong adopsi produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan di Korea Selatan (Lee, Lim, & Song, 2005). Gaya hidup mandiri perempuan muda sering kali dikaitkan dengan keputusan konsumsi yang lebih bertanggung jawab, seperti memilih produk yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi energi. Preferensi ini telah memaksa banyak perusahaan untuk mengubah pendekatan mereka, beralih ke praktik bisnis yang lebih hijau untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar akan dampak lingkungan (Bell, Hickel, & Zoomkawala, 2023). Tren ini menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pembangunan yang tidak hanya berbasis profit, tetapi juga keberlanjutan.

Namun, di tengah berbagai peluang yang muncul, tantangan tetap ada bagi sektor tradisional yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Industri seperti pernikahan dan properti keluarga besar harus berinovasi untuk tetap relevan di tengah perubahan preferensi generasi muda (Kim, et al, 2021) karena data menunjukkan bahwa tren pengeluaran warga Korea Selatan untuk Bulan Keluarga mengalami penurunan. Inovasi perlu dilakukan dengan konsep-konsep baru yang lebih minimalis mulai menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan gaya hidup modern. Adaptasi ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan sektor tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi modern tidak mengorbankan nilai-nilai yang sebelumnya mendukung struktur sosial tradisional (United Nation, 2002).



Gambar 1. Pengeluaran Warga Korea Selatan selama Bulan Keluarga (2019-2020)

Sumber: Statista

2. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan dan Angkatan Kerja

Mengacu pada salah satu fokus pembangunan manusia yakni adanya pemberdayaan, gerakan 4B di Korea Selatan telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dengan mengubah fokus mereka dari pernikahan dan keluarga tradisional menuju pengembangan karier dan stabilitas finansial. Menurut data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), partisipasi tenaga kerja perempuan meningkat dari sekitar 50% di awal 2000-an menjadi 58% pada tahun 2023. Selain itu, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi juga menunjukkan kemajuan pesat, mencapai 71,3% pada tahun 2020, melampaui laki-laki (Kim & Jung, 2024). Perempuan yang tetap bekerja memiliki penghasilan *disposable* lebih besar, yang sering kali mereka manfaatkan untuk investasi dalam pendidikan, bisnis kecil, atau peningkatan kualitas hidup. Namun, meskipun partisipasi perempuan meningkat, kesenjangan upah gender tetap menjadi tantangan utama, dengan perempuan masih menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja yang setara (Lee, 2022).

Meskipun kontribusi perempuan dalam ekonomi Korea Selatan telah menunjukkan peningkatan, kesenjangan upah gender tetap menjadi hambatan signifikan. Perempuan umumnya menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja yang setara (Yang & Li, 2025). Ketimpangan ini mencerminkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan positif dalam partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan pendidikan, tantangan struktural untuk mencapai kesetaraan gender masih membutuhkan perhatian yang lebih serius dan tindakan yang terarah.

Kesenjangan upah gender di Korea Selatan tidak hanya menjadi tantangan bagi perempuan tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Ketimpangan ini mengakibatkan hilangnya potensi produktivitas, karena perempuan dengan keterampilan setara sering kali ditempatkan pada posisi yang dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki (Schollmeier & Scott, 2024). Penelitian menunjukkan

bahwa jika kesenjangan upah gender dapat dikurangi hingga separuhnya, potensi PDB Korea Selatan bisa meningkat hingga 4% pada tahun 2030. Pada tahun 2021, perempuan di Korea Selatan menerima rata-rata 31,1% lebih sedikit dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama (Han, et al, 2023). Ketidaksetaraan ini juga membatasi kontribusi perempuan di sektor strategis seperti teknologi dan keuangan, yang sangat membutuhkan diversifikasi tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

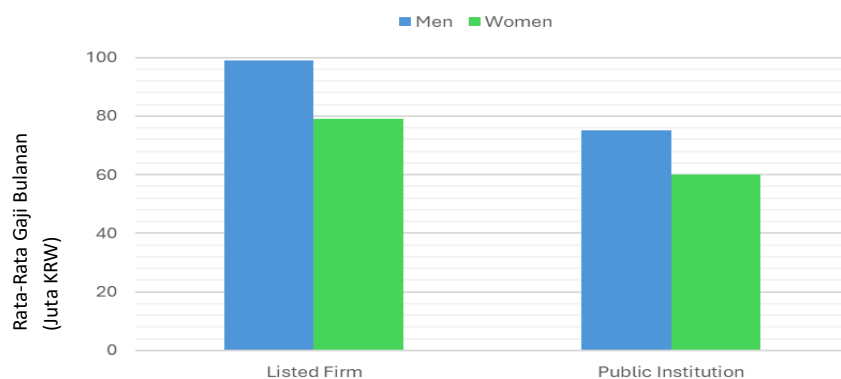
Salah satu penyebab utama kesenjangan upah gender di Korea Selatan adalah norma sosial dan budaya yang memperkuat peran tradisional perempuan dalam rumah tangga. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% perempuan mengurangi jam kerja atau meninggalkan pekerjaan mereka setelah memiliki anak (Dyner, Kirkegaard, & Stansbury, 2022). Beban tanggung jawab domestik ini menghalangi perempuan untuk mengejar karier di tingkat manajerial atau meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, hanya 5% perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan besar, proporsi yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya (*World Economic Forum*). Bias dalam proses rekrutmen dan promosi, serta kurangnya fleksibilitas kerja, semakin memperburuk kesenjangan upah gender. Jika akar masalah ini tidak segera diatasi, kesetaraan di tempat kerja akan tetap menjadi tantangan besar.

Dampak dari kesenjangan upah gender juga sangat terasa pada kehidupan perempuan di Korea Selatan, baik secara ekonomi maupun sosial. Perempuan dengan pendapatan lebih rendah memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan lanjutan atau peluang investasi, yang membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Data dari Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa perempuan hanya mengontrol 23% dari total aset rumah tangga, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (Gai & Haworth, 2024). Ketimpangan ini juga berdampak pada masa depan mereka; perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan di usia lanjut akibat rendahnya akumulasi pensiun selama bekerja. Pada tahun 2020, lebih dari 40% perempuan lanjut usia di Korea Selatan hidup di bawah garis kemiskinan, dibandingkan dengan 25% laki-laki (Korea Statistic, 2021). Ketidaksetaraan ini memperburuk ketergantungan perempuan pada dukungan negara atau keluarga, yang menambah beban sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Menyadari dampak luas dari kesenjangan upah gender, pemerintah Korea Selatan telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan undang-undang yang mewajibkan transparansi upah di perusahaan besar, yang mulai berlaku pada tahun 2021 (Bennedsen, Larsen, & Wei, 2023). Data awal menunjukkan bahwa kebijakan ini mendorong 12% perusahaan untuk meninjau ulang struktur upah mereka pada tahun pertama implementasi. Selain itu, pemerintah meluncurkan program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan untuk meningkatkan representasi mereka di posisi manajerial. Namun, hanya 18% perusahaan yang secara aktif mengikuti program ini pada tahun 2023, menunjukkan bahwa adopsi kebijakan masih terbatas (Mun-Hee, 2025). Untuk meningkatkan dampaknya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan

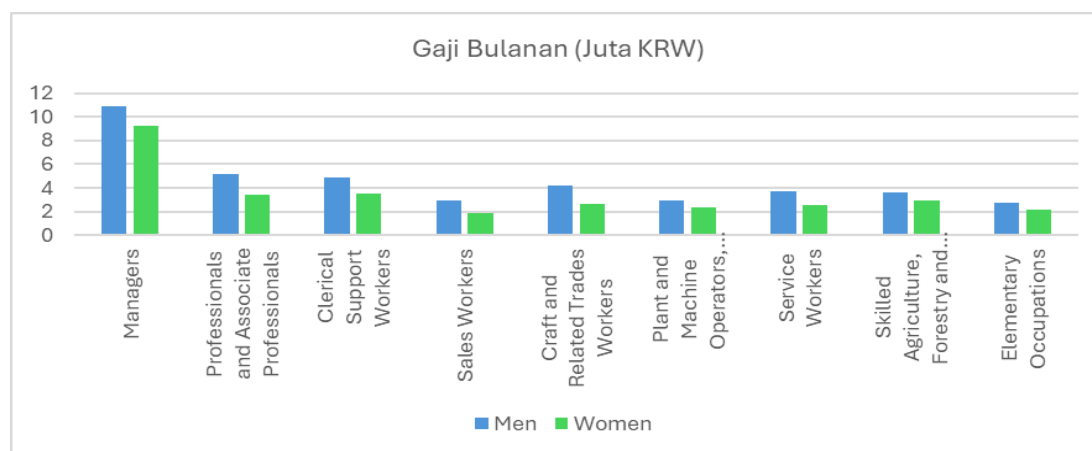
pelaksanaan kebijakan ini, memberikan insentif bagi perusahaan yang menunjukkan kemajuan, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja.

Namun, meskipun langkah-langkah seperti transparansi upah dan pelatihan kepemimpinan telah diperkenalkan, tantangan struktural tetap menjadi penghalang signifikan untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja. Banyak perempuan menghadapi bias gender yang tidak terlihat, seperti kurangnya dukungan institusional untuk mengelola tanggung jawab domestik dan profesional secara bersamaan. Data dari *Korean Women's Development Institute* pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% perempuan yang meninggalkan pekerjaan mereka menyebut beban domestik sebagai alasan utama, dibandingkan dengan hanya 12% laki-laki. Selain itu, survei nasional mengungkapkan bahwa 53% perempuan merasa kurang mendapatkan kesempatan untuk promosi dibandingkan rekan laki-laki mereka dengan kualifikasi setara (Kim, Kim, & Baek, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan formal saja tidak cukup; diperlukan perubahan budaya organisasi yang lebih mendalam untuk mengatasi hambatan sistemik ini dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.



Gambar 2. Kesenjangan Gaji Pria dan Wanita di Korea Selatan Tahun 2023

Sumber: Korea Herald



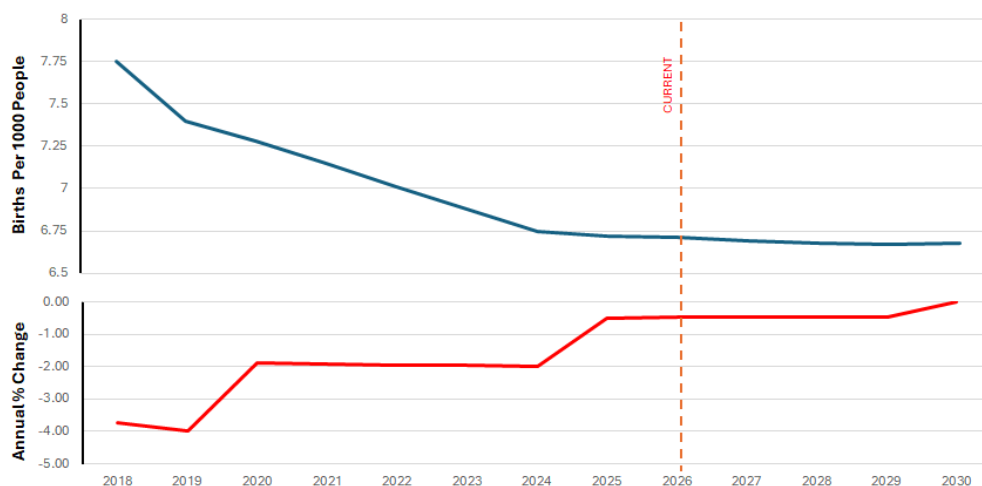
Gambar 3. Kesenjangan Gaji Pria dan Wanita di Korea Selatan Berdasarkan Sektor

Sumber: Xinhua News Agency

Selain itu, tingkat keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik dan bisnis di Korea Selatan masih tergolong rendah. Di parlemen, perempuan hanya menduduki sekitar 19% dari total 300 kursi di Majelis Nasional Republik Korea, dalam portal data statistik 2024, meskipun pemerintah telah menerapkan sistem kuota 30% untuk kandidat perempuan dalam pemilu legislatif. Hambatan budaya dan struktural tetap menjadi faktor penghalang utama dalam meningkatkan keterwakilan ini. Di sektor manajerial, perempuan hanya mengisi sekitar 12% dari posisi kepemimpinan di perusahaan-perusahaan besar. Situasi ini menggarisbawahi kesenjangan gender yang signifikan di ranah kepemimpinan, baik dalam politik maupun bisnis, yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih substantif di Korea Selatan.

3. Krisis Demografi

Gerakan ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam hal penurunan populasi usia produktif akibat rendahnya angka kelahiran. Korea Selatan menghadapi risiko yang serupa dengan Jepang, di mana penuaan populasi menciptakan tekanan pada sistem jaminan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Higo & Klassen, 2015). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tingkat kelahiran di Korea Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,717 kelahiran per 1.000 penduduk, yang menunjukkan penurunan sebesar 0,39% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat dalam *World Population Prospect*. Dalam konteks ini, pemerintah dan sektor swasta perlu memberikan kebijakan yang inklusif untuk perempuan.



Gambar 4. Angka Kelahiran Korea Selatan

Sumber: *United Nations*

Korea Selatan menghadapi tantangan demografi yang serius akibat penurunan angka kelahiran dan populasi usia produktif. Menurut data dari *Statistics Korea*, total populasi diproyeksikan turun dari 51,75 juta pada tahun 2024 menjadi 46,27 juta pada tahun 2052, dan bahkan menyusut hingga 36 juta pada tahun 2072, mencerminkan penurunan sekitar 30% dari populasi saat ini (United Nation, 2024). Tingkat kesuburan yang sangat rendah, yakni hanya 0,72 kelahiran per perempuan pada tahun 2023, jauh di bawah angka pengganti, turut mempercepat proses ini. Selain itu, penuaan populasi

menjadi tantangan utama, dengan perkiraan bahwa 47% penduduk akan berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2072, di mana perempuan diprediksi mendominasi kelompok usia lanjut karena harapan hidup yang lebih tinggi (Yeung & Jones, 2024). Tantangan ini memberikan tekanan besar pada sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Namun, pergeseran demografi ini juga mendorong munculnya peluang ekonomi baru yang berbasis inovasi dan efisiensi. Penurunan populasi usia produktif telah memacu pengembangan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan di berbagai sektor industri untuk menggantikan tenaga kerja manusia (Paksiutov, 2021). Selain itu, Korea Selatan mulai mengalihkan fokusnya pada ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas, yang lebih mengutamakan kualitas inovasi daripada jumlah tenaga kerja. Pergeseran ini menciptakan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih besar dalam sektor teknologi, penelitian, dan pengembangan, sekaligus mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan demografi.

Upaya menantang norma patriarkal yang dilakukan oleh Gerakan 4B memiliki relevansi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-5, yaitu kesetaraan gender. Dengan membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam ekonomi dan menolak standar gender yang tidak adil, gerakan ini mendukung indikator SDG-5, seperti penghapusan diskriminasi berbasis gender dan akses terhadap pekerjaan yang layak (Yang & Li, 2025). Dalam 5 tahun terakhir, penelitian dari OECD pada tahun 2021 menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja di Korea Selatan sebesar 2,3% telah berkontribusi pada pertumbuhan sektor teknologi dan jasa, terutama di kota-kota besar seperti Seoul dan Busan. Pada 2022, sektor *e-commerce* di Korea Selatan, yang sebagian besar digerakkan oleh wirausaha perempuan, mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,8%, memperluas pasar digital dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru didasarkan pada Portal Data dan Statistik 2023. Perubahan ini mencerminkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu perempuan, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor berbasis inovasi.

Meskipun demikian, tantangan struktural tetap ada, terutama dalam hal kesenjangan upah gender. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* (WEF), Korea Selatan menempati peringkat ke-112 dari 146 negara dalam kesetaraan gender terkait partisipasi ekonomi dan peluang perempuan per Juni 2024 (*World Economic Forum*, 2024). Selain itu, data OECD menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kesenjangan upah gender di Korea Selatan mencapai 31,1%, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara OECD, dengan perempuan rata-rata menerima 68,9% dari gaji laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam keterlibatan perempuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menghapus ketimpangan yang menghambat pencapaian kesetaraan gender sepenuhnya.

Peluang dan Tantangan Reduksi Disparitas Gender

Salah satu kesulitan utama dalam merealisasikan SDG-5 di Korea Selatan adalah keberlanjutan kesenjangan struktural, seperti kesenjangan upah gender yang masih tinggi dan ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi bagi perempuan. Meskipun tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan pendidikan tinggi telah meningkat, perempuan tetap menghadapi diskriminasi berbasis gender, baik dalam bentuk akses terhadap pekerjaan yang setara maupun upah yang adil. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kesenjangan upah gender di Korea Selatan mencapai 31,1%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara OECD (Dyran, Kirkegaard, & Stansbury, 2022). Tantangan ini diperburuk oleh norma sosial yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga memperlambat upaya untuk mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh. Ketimpangan ini berdampak langsung pada perekonomian, karena perempuan yang tidak diberdayakan secara maksimal dalam pasar tenaga kerja kehilangan peluang untuk berkontribusi pada sektor produktif. Dengan akses yang terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan posisi kepemimpinan, kapasitas inovasi dan diversifikasi ekonomi nasional juga terhambat (Lee, Lim, & Song, 2005). Hal ini pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena talenta dan keterampilan perempuan yang signifikan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Norma patriarkal mengganggu keberlangsungan SDG-5 karena norma ini memperkuat ekspektasi tradisional yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Di Korea Selatan, ekspektasi bahwa perempuan harus lebih memprioritaskan peran domestik dibandingkan karier mereka menciptakan hambatan sosial dan psikologis yang signifikan (Cicowiez & Lofgren, 2023). Norma ini tidak hanya menghalangi perempuan untuk mengakses peluang yang setara, tetapi juga melanggengkan sistem yang diskriminatif, termasuk pengabaian terhadap kontribusi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi (Dyran, Kirkegaard, & Stansbury, 2022). Dengan demikian, tantangan untuk mengubah norma patriarkal menjadi sangat krusial, karena perubahan tersebut merupakan langkah penting untuk mendukung pencapaian indikator-indikator SDG-5 secara berkelanjutan.

Ekspektasi sosial yang menempatkan perempuan pada peran domestik telah mengurangi dorongan mereka untuk mengejar karier atau pendidikan tinggi, terutama di bidang strategis seperti sains dan teknologi. Hal ini berdampak pada rendahnya angka partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan STEM di Korea Selatan, di mana perempuan hanya menyumbang 21,17% dari total mahasiswa yang mengambil jurusan sains dan teknik di pendidikan tinggi pada tahun 2022 (Korea Foundation for Women in Science, Engineering and Technology). Angka ini mencerminkan tantangan yang masih berlangsung dalam menarik dan mempertahankan mahasiswa perempuan di bidang STEM, meskipun terdapat beberapa perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang hanya mencapai 54,4% pada tahun 2021 semakin mempertegas bahwa norma-norma tradisional

menciptakan hambatan signifikan bagi perempuan untuk mengakses peluang yang setara (Yilanci & Ozgur, 2024). Dengan terbatasnya kontribusi perempuan dalam pasar tenaga kerja, potensi ekonomi nasional juga mengalami kerugian yang signifikan, sehingga menghambat upaya membangun ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif.

Kebijakan publik memegang peran penting dalam mengubah norma sosial yang membatasi perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui pendidikan berbasis gender di sekolah yang mengajarkan pentingnya kesetaraan sejak dini. Sebagai contoh, Swedia telah berhasil meningkatkan representasi perempuan dalam bidang STEM hingga 52% pada tahun 2022 melalui penerapan kurikulum yang menekankan kesetaraan gender (Silander, Drange, Pietila, & Reisel, 2022). Pemerintah Korea Selatan telah meningkatkan durasi cuti orang tua berbayar untuk ayah, sebagai bagian dari kebijakan pro-keluarga untuk mendorong peran lebih aktif laki-laki dalam pengasuhan anak. Sebagai hasilnya, jumlah ayah yang mengambil cuti orang tua meningkat dari 17,8% pada tahun 2018 menjadi 27,8% pada tahun 2021, mencerminkan perubahan positif dalam pembagian peran domestik yang lebih setara. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan domestik pada perempuan, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam dunia kerja (Korea Statistic, 2021). Dengan keterlibatan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan di rumah, perempuan memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar karier, yang pada akhirnya mendukung kesetaraan gender di tempat kerja.

Di samping kebijakan, perempuan yang berhasil mendobrak norma patriarkal juga berperan sebagai agen perubahan yang signifikan. Kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan dan sektor ekonomi strategis memberikan contoh nyata bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi yang setara bahkan lebih dalam mendukung pembangunan ekonomi. Misalnya, pada tahun 2022, perempuan mengisi 35% posisi eksekutif di perusahaan teknologi besar di Korea Selatan, meningkat dari hanya 18% pada tahun 2015. Selain itu, jumlah wirausaha perempuan di sektor digital tumbuh sebesar 29% dalam periode 2019 hingga 2023 (The Asia Foundation, 2025). Perubahan ini menunjukkan bahwa keberanian perempuan untuk mendobrak tradisi dapat menjadi inspirasi sekaligus katalis bagi perubahan sosial yang lebih luas.

Transformasi sosial yang didorong oleh perubahan norma gender ini juga berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan. Tercatat pada tahun 2022, perempuan menyumbang sekitar 22% dari tenaga kerja di sektor energi terbarukan di Korea Selatan, meningkat dari 16% pada tahun 2018 (Pollin, et al 2022). Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan teknologi hijau, Korea Selatan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Data dari McKinsey Global Institute (2021) menunjukkan bahwa menghilangkan hambatan gender di pasar tenaga kerja dapat meningkatkan PDB global hingga \$12 triliun pada tahun 2025 (Clark, 2015). Tren ini membuktikan bahwa kesetaraan gender tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara global.

Namun, meskipun banyak perubahan positif telah terjadi, tantangan untuk mengubah norma patriarkal tetap signifikan. Resistensi budaya dari generasi terdahulu yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional menjadi salah satu hambatan utama. Sebuah studi di Korea Selatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 48% masyarakat berusia di atas 50 tahun percaya bahwa perempuan harus memprioritaskan keluarga dibandingkan karier (Kim, Kim, & Baek, 2024). Selain itu, perempuan yang berani mendobrak norma sering kali menghadapi stigma sosial, seperti dianggap melawan adat istiadat atau kehilangan dukungan komunitas. Tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya perlindungan institusional yang memadai, terutama bagi perempuan yang menjadi korban diskriminasi berbasis gender. Oleh karena itu, meskipun transformasi sosial sedang berlangsung, perubahan ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan menyeluruh, termasuk advokasi berkelanjutan dan reformasi kebijakan yang progresif.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa bahwa pembangunan ekonomi dapat dilakukan dalam berbagai perspektif. Salah satu poin penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi modern adalah dengan melakukan pembangunan manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai sebagai aset paling berharga yang memiliki dampak terhadap tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Modal manusia (*Human Capital*) inilah yang selanjutnya menempatkan peran manusia tidak dapat diabaikan apabila sebuah negara ingin mencapai keberhasilan pembangunan yang holistik. Salah satu poin penting pembangunan manusia adalah adanya pemberdayaan. Tentu dalam hal ini juga mencakup dalam pemberdayaan perempuan.

Perubahan norma gender di Korea Selatan merupakan salah satu wujud bagaimana perempuan yang berdaya dapat memberikan dampak pada kondisi pembangunan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Gerakan tersebut juga sejalan dengan poin SDGs 5 yang berfokus pada bagaimana kesetaraan gender dapat tercapai. Studi kasus gerakan B4 ini penting untuk memahami hubungan antara transformasi sosial, pembangunan ekonomi, dan kesetaraan gender. Dapat dilihat bahwa gerakan tersebut pada akhirnya membawa perubahan pada pola konsumsi masyarakat, tingkat partisipasi pendidikan dan angkatan kerja perempuan, serta pengaruh besar terhadap fluktuasi demografi sebuah negara. Gerakan B4 telah memberikan perubahan pada modal manusia di Korea Selatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, guna merespon gerakan tersebut perlu adanya kebijakan yang adaptif dan inklusif untuk diterapkan yang dapat memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih adil, progresif, dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Faizah, S. A., Perwithosuci, W., & Hidayah, N. (2022). Women's Literacy Rate and Women's Labor Participation in ASEAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian*

- Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 23(1), 56–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jep.v23i1.17183>
- Bahari, G. B. (2023). Upaya Pemulihan Pariwisata Korea Selatan dari Pandemi Covid-19. *Journal of International Realtions*, 9(2), 42–60.
- Bell, K., Hickel, J., & Zoomkawala, H. (2023). Which Direction for Sustainable Development? A Time Series Comparison of The Impacts of Redistributive Versus Market Policies in Bolivia and South Korea. *Sustainable Development*, 31(5), 3408–3427. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.2592>
- Bennedsen, M., Larsen, B., & Wei, J. (2023). Gender Wage Transparency and The Gender Pay Gap: A Survey. *Journal of Economic Surveys*, 37(5), 1743–1777. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/joes.12545>
- Cicowiez, M., & Lofgren, H. (2023). Child and Elderly Care in South Korea: Policy Analysis with A Gendered, Care-Focused Computable General Equilibrium Model. *Philippine Review of Economics*, 60(1), 19–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.37907/3ERP3202J>
- Clark, R. (2015). The Power of Print. In *Holy Legionary Youth: Fascist Activism in Interwar Romania* (pp. 122–150). online edn, Cornell Scholarship Online. <https://doi.org/https://doi.org/10.7591/cornell/9780801453687.003.0006>
- D'Ambrosio, C., & Rao, D. S. P. (2015). Review of Income and Wealth Report of the Editors (covering the period 1/08/14 to 31/07/15, regular issues). *The Review of Income and Wealth*, 61(4), 829–834. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/roiw.12223>
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).
- Dynan, K. E., Kirkegaard, J. F., & Stansbury, A. (2022). Why Gender Disparities Persist in South Korea's Labor Market. *SSRN Electronic Journal*, July. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.4175359>
- Entekhabi, M. (2023). Human Capital in Developing Countries: Common Challenges and the Path Forward. *Journal of Emerging Trends in Marketing and Management*, 1(2), 18–29.
- Faridatussalam, S. R., Wahyuningrum, D., & Anggraini, C. D. (2023). Does Human Capital and Gender Equality Affect Economic Growth for Ten Province in Sumatera? *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ijbe.v5i1.16339>
- Gai, P., & Haworth, C. (2024). Asset Bubbles and Wealth Inequality. *Scandinavian Journal of Economics*, 126(4), 773–809. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/sjoe.12560>
- Han, A., Taejong, K., Ten, G. K., & Wang, S. (2023). Air Pollution And Gender Imbalance In Labor Supply Responses: Evidence From South Korea. *Economic Modelling*, 124. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106290>
- Higo, M., & Klassen, T. R. (2015). *Retirement in Japan and South Korea: The past, The Present and The Future of Mandatory Retirement*. Routledge.
- Humairah, S. S., & Dewi, A. U. (2025). Nilai-Nilai Konfusianisme dan Stagnasi Perkembangan Gerakan Feminisme di Korea Selatan. *Padjajaran Journal of International Relations*, 7(1), 39–53. <https://doi.org/10.24198/padjir.v7i1.54113>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on The Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Karim, D. A., Pattiruhu, C. M., & Chin, J. (2022). The Role of Education in Promoting

- Gender Equality. *International Journal of Gender Studies*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.61942/msj.v2i4.254>
- Kim, D., & Jung, H. (2024). The Long-Term Impact of College Education on Women's Attitudes Toward Marriage and Children. *Journal of Family Issues*, 45(1), 103–123. <https://doi.org/10.1177/0192513X221150982>
- Kim, J. (2021). The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea: Key Issues and Challenges for Contemporary Feminist Activism. *Korea Journal*, 61(4), 75–101. <https://doi.org/10.25024/kj.2021.61.4.75>
- Kim, J. (2023). The Gender War and the Rise of Anti-family Sentiments in South Korea. In *The Demography of Transforming Families* (1st ed., pp. 183–201). Springer Cham. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-29666-6>
- Kim, J. H., Lee, Y., Bae, J., & Kim, W. C. (2021). Recent Trends and Perspectives on The Korean Asset Management Industry. *Journal of Portfolio Management*, 47(7), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.3905/JPM.2021.1.248>
- Kim, J. O., Forsythe, S., Gu, Q., & Moon, S. J. (2002). Cross-Cultural Consumer Values, Needs And Purchase Behavior. *Journal of Consumer Marketing*, 19(6), 481–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/07363760210444869>
- Kim, N., Kim, K. N., & Baek, P. (2024). Understanding South Korean Women Workers' Career Transition Experiences: Using The Career Decision Tree Model. *Frontiers in Psychology*, 15–2024, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1273241>.
- Korea Statistic. (2021). *Preliminary Results of 2021 Parental Leave Statistics*.
- Lee, J., & Jeong, E. (2021). The 4B Movement: Envisioning a Feminist Future with/in a Non-Reproductive Future in Korea. *Journal of Gender Studies*, 30(5), 633–644. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1929097>
- Lee, K. (2022). The Gender Wage Gap: Evidence from South Korea. *IZA Journal of Labor Economics*, 11(1), 1–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.2478/izajole-2022-0005>
- Lee, K., Lim, C., & Song, W. (2005). Emerging Digital Technology as A Window Of Opportunity and Technological Leapfrogging: Catch-Up In Digital TV By The Korean Firms. *International Journal of Technology Management*, 29(1–2), 40–63. [https://doi.org/Leapfrogging: Catch-Up In Digital TV By The Korean Firms. International Journal of Technology Management, 29\(1–2\), 40–63. https://doi.org/10.1504/IJTM.2005.006004](https://doi.org/Leapfrogging: Catch-Up In Digital TV By The Korean Firms. International Journal of Technology Management, 29(1–2), 40–63. https://doi.org/10.1504/IJTM.2005.006004)
- Manek, B. G. A. (2023). Confucian Historical Narratives and Misogynic Culture in South Korea. *Journal of Asian Social Science Research*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jassr.v5i1.73>
- Masood, R., & Erdogdu, A. (2024). Gender Discrimination, Glass Ceiling and Other Obstacles Faced by Women in Society. *Journal of Life Economics*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.15637/jlecon.2246>
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mun-Hee, C. (2025). Historic High in Female Employment Rate in South Korea at 54.1% in 2023. *Business Korea*. <https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=233785>
- Paksiutov, G. D. (2021). Transformation of the Global Film Industry: Prospects for Asian Countries. *Russia in Global Affairs*, 19(2), 111–132. <https://doi.org/DOI:10.31278/1810-6374-2021-19-2-111-132>
- Pollin, R., Wicks-Lim, J., Chakraborty, S., Semieniuk, G., & Yoon, J. (2022). *A Green Economy Transition Program for South Korea*.
- Purba, S. F. (2024). The Role of Women in East Kalimantan's Economic Growth. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(1), 43–56.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v20i1.1313>
- Puspitasari, N., & Sundari, R. (2025). Analisis Program Gender And Employment Oleh International Labor Organization (ILO) Dalam Pekerjaan Dan Upah Di Korea Selatan Tahun 2022-2024. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social, and Politics*, 11(2), 284-298. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).23766](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).23766)
- Schollmeier, R., & Scott, A. (2024). Examining The Gender Wage Gap in Logistic. *Journal of Business Logistic*, 45(1), 1-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jbl.12363>
- Shakina, S. (2022). Gerakan 4B sebagai Respons terhadap Budaya Patriarki di Korea Selatan.
- Silander, C., Drange, I., Pietila, M., & Reisel, L. (2022). Promoting Gender Equality in STEM-oriented Universities: Institutional Policy Measures in Sweden, Finland and Norway. In *Gender Inequalities in Tech-Driven Research and Innovation Living the Contradiction* (pp. 93-108). Bristol University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctv2ngx5c4.11>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.
- The Asia Foundation. (2025). *Accelerating Women's Entrepreneurship in South Korea*. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/09/Accelerate-Womens-Entrepreneurship-and-Economic-Opportunities-in-Korea_ExecSummary2019.pdf
- United Nation. (2002). The effects of Globalization on CARICOM Caribbean Economies. In *Globalization and Development* (pp. 331-354).
- United Nation. (2024). *World Population Prospect 2024*. <https://population.un.org/wpp/>
- Waring, M. (1988). *If Women Counted: A New Feminist Economics*. Harper & Row.
- Yang, J., & Li, F. (2025). The Impact of Technological Progress on Pharmacovigilance. In *Pharmacovigilance - Facts, Challenges, Limitations and Opportunities*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1003318>
- Yeung, W. J. J., & Jones, G. W. (2024). Emerging Dimensions of Marriage in Asia. *Journal of Family Issues*, 45(5), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0192513X231157403>
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2024). Unemployment and Labour Force Participation in South Korea: Johansen-Type Cointegration Analysis with a Fourier Approach. *Politicka Ekonomie*, 72(1), 122-141. <https://doi.org/DOI:10.18267/j.polek.1410>
- Yoon, D. (2018). The Policy Research for the Improvement of Excessive Marriage Expense in South Korea. *International Business Research*, 11(2), 44-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.5539/ibr.v11n2p44>
- Zenebe, N. T., Han, Y., & Hong, S. (2025). Examining Barriers of Representation in Gender: Glass Ceiling and Glass Walls in the Ethiopian Bureaucracy. *Review of Public Personnel Administration*, 0(0). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0734371X251322799>
- Zimmermann, B. (2023). *South Korea's 4B Movement Lowers the Birth Rate in a Fight for Gender Equality*. The International Affairs Review. <https://www.iar-gwu.org/blog/iar-web/south-koreas-4b>